

PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Oleh: Iwan Setiawan*)

ABSTRAKS

Indonesia sedang dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut, sebagian merupakan imbas dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu lalu yang berakibat pada tingginya angka pengangguran. Masalah lainnya yang dihadapi adalah masalah kualitas tenaga kerja yang rendah, upah, jaminan sosial dan lain-lain. Di tengah rumitnya permasalahan tersebut, sektor pertanian masih memiliki peran yang penting dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kontribusi sektor ini dalam ketenagakerjaan masih sangat tinggi walaupun ada kecenderungan semakin meningkatnya penambahan tenaga kerja pada sektor industri, jasa dan perdagangan. Kontribusi dari sektor pertanian ternyata tidak diimbangi dengan kebijakan yang sepenuhnya pro terhadap pertanian. Rencana strategis pembangunan pertanian 2004-2009, yang di dalamnya cukup mendukung terhadap upaya pembangunan pertanian, pada kenyataannya setelah beberapa waktu berlangsung, belum banyak menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sering bertentangan dengan keinginan petani atau dapat dikatakan merugikan petani. Kenaikan harga pupuk, impor produk pertanian, dan lain-lain merupakan contoh riil dari pertentangan antara petani dan pemerintah. Semua itu, menempatkan sektor pertanian dan petani pada posisi yang marginal. Sektor pertanian menjadi tidak menarik bagi penduduk usia muda, sehingga muncul gejala kekurangan buruh tani di pedesaan. Mereka cenderung lebih tertarik untuk melakukan urbanisasi, sehingga tenaga kerja yang tersisa di pedesaan adalah penduduk usia tua (ageing population).

Kata kunci: Sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja.

*) Iwan Setiawan, S.Pd. M.Si., adalah Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

1. Pendahuluan

Sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini masih memegang peranan penting berdampingan dengan sektor lainnya, khususnya industri. Walaupun sektor tersebut semakin berkurang kontribusinya terhadap pendapatan negara, tetapi sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Perkembangan kota dan permukiman yang terus terjadi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kondisi ini berdampak pada semakin sempitnya luas lahan pertanian. Setidaknya terdapat dua alternatif yang ditempuh, yaitu membuka lahan pertanian baru dan beralih pekerjaan dalam bidang non pertanian.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan dari pertanian sudah tidak lagi mampu mengimbangi peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup petani. Pendapatan yang semakin rendah berakibat pada semakin tidak menariknya pekerjaan sebagai petani. Kondisi ini pula yang mengakibatkan tenaga kerja produktif, terutama yang berusia muda, lebih memilih bidang pekerjaan di luar sektor pertanian. Mereka lebih baik mencari pekerjaan di kota yang upahnya lebih baik, sehingga desa kekurangan tenaga kerja potensial yang masih muda untuk mengembangkan sektor pertanian.

2. Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi berbagai aspek, baik menyangkut masalah pengangguran, kualitas, upah, jaminan sosial, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan lain-lain. Pada tahun 2005, dari 155,549,724 juta jiwa penduduk usia kerja terdapat 105.802.372 juta atau 68 persen angkatan kerja. Dari angka tersebut, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10.854.254 jiwa. Antara desa dengan kota, terdapat perbedaan angka pengangguran terbuka yang tidak begitu besar yaitu 4.965.960 jiwa di desa dan 5.888.294 jiwa di kota.

PENGANGGUR TERBUKA MENURUT KATEGORI PENGANGGUR dan KOTA DESA, TAHUN 2005

Kategori Penganggur	Kota	Desa	Jumlah
Mencari Pekerjaan	4,126,332	2,608,729	6,735,061
Mempersiapkan Usaha	65,490	35,482	100,972
Merasa putus asa	1,540,623	2,066,546	3,607,169
Sudah punya tapi belum bekerja	155,849	255,203	411,052
Jumlah	5,888,294	4,965,960	10,854,254

Sumber: Depnaker, 2005

Masalah lainnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Walaupun angka pengangguran pada lulusan perguruan tinggi terus meningkat, tetapi sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan pendidikan dasar (SD-SMP) yang tentunya memiliki daya saing yang relatif rendah. Data tahun 2006 menunjukkan sebesar 52.945.034 jiwa (55,6 %) penduduk yang bekerja berpendidikan SD. Penduduk yang bekerja dan berpendidikan perguruan tinggi masih sangat kecil. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan dan menunjukkan daya saing yang rendah dari penduduk Indonesia yang bekerja.

**PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN
DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 2006**

Pendidikan	JENIS KELAMIN		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
> SD	32.080.806	20.864.228	52.945.034
SMPN	13.626.819	5.416.730	19.043.549
SMAN	12.960.737	4.924.990	17.885.727
Akademi/Diploma	1.133.959	1.013.419	2.147.378
Universitas	2.062.006	1.093.408	3.155.414
Jumlah	61.864.327	33.312.775	95.177.102

Sumber : BPS/Sakernas 2006

Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah upah dan kesejahteraan pekerja yang relatif rendah. Pada satu sisi, upah merupakan daya saing yang menguntungkan karena akan menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, bagaimanapun upah yang rendah juga merupakan kenyataan yang harus diubah karena menyangkut kesejahteraan tenaga kerja. Dilihat dari sisi upah, sektor pertanian merupakan sektor yang tingkat upahnya paling rendah dibanding sektor lainnya. Rata-rata upah pada sektor pertanian hanya mencapai Rp. 343.893,-/bulan. Kondisi ini makin diperparah oleh semakin tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok yang berakibat berkembangnya kemiskinan di kalangan petani.

Masalah lainnya yang dihadapi ketenagakerjaan di Indonesia adalah jaminan sosial yang rendah. Belum semua buruh mendapatkan jaminan sosial berupa kesehatan dan tunjangan lainnya. Semua ini membuat tenaga kerja Indonesia tidak memiliki jaminan kesejahteraan dan masa depan yang jelas. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sehingga menimbulkan aksi perlawanan dan merugikan perusahaan itu sendiri.

Permasalahan pelik lainnya adalah masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. TKI seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan majikannya yang

semena-mena. TKI juga seringkali mendapatkan masalah ketika kebijakan negara tempat mereka bekerja memberlakukan peraturan secara sepihak yang merugikan mereka. Jasa-jasa penyalur TKI juga seringkali merugikan TKI, bahkan ada diantaranya yang menjadikan TKI untuk dijadikan sebagai pekerja seks di luar negeri.

3. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian

Di tengah berbagai permasalahan tersebut, sektor pertanian masih memegang peran yang sangat strategis bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Selama periode 1996-2002, rata-rata untuk setiap 10 orang pekerja Indonesia, 4-5 diantaranya bekerja atau berusaha di lapangan usaha itu. Sementara itu, berdasarkan data sakernas tahun 2006, penduduk Indonesia yang bekerja dalam bidang pertanian mencapai 42.039.250 orang dari 95.177.102 orang (44,2 %) penduduk Indonesia yang bekerja. Memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia sangat tidak realistis jika mengabaikan sektor pertanian. Sektor inilah yang justru tidak mengalami pukulan yang hebat di saat sektor lain mengalami keterpurukan oleh krisis ekonomi. Bahkan, beberapa komoditi pertanian, terutama perikanan justru mengalami keuntungan luar biasa pada saat krisis ekonomi terjadi.

Data di atas menunjukkan bahwa pekerja Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada profesi petani. Profesi-profesi lain yang tergolong memiliki produktivitas tinggi termasuk profesional/teknisi dan managerial/administrasi masih sangat rendah proporsinya. Walaupun demikian, terdapat adanya kecenderungan semakin meningkatnya persentase penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian dari waktu ke waktu. Selama kurun waktu 1990-1997, tenaga kerja sektor bukan pertanian meningkat lebih dari 16,5 juta orang, sebaliknya tenaga kerja di sektor pertanian turun lebih dari 6,7 juta orang. Sektor perdagangan, jasa, industri dan konstruksi mengalami penambahan tenaga kerja mencolok. Selama kurun waktu itu, tenaga kerja bukan pertanian secara keseluruhan tumbuh sekitar 6,0 persen per tahun.

Masih tingginya daya serap sektor pertanian tidak disertai dengan upaya yang memadai dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif untuk berkembangnya sektor tersebut. Petani dan sektor pertanian masih ditempatkan pada posisi marginal. Kebijakan pemerintah cenderung bertentangan dengan keinginan para petani. Kebijakan impor beras, gula, dan komoditi lainnya mencerminkan pertentangan antara keinginan petani dan pemerintah. Kondisi ini membuat nasib petani tidak beranjak menjadi lebih baik. Pernyataan Bank Dunia beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kenaikan harga beras menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 3,1 juta orang.

Sektor pertanian juga semakin tergeser oleh sektor lainnya dengan semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian dan semakin luasnya lahan kritis. Pembangunan permukiman yang meluas sampai ke daerah pedesaan membuat lahan pertanian yang subur tidak lagi menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Desakan kebutuhan akan lahan kemudian muncul ketika petani sudah tidak memiliki lahan yang memadai untuk diolah. Pada akhirnya mereka membuka lahan baru yang seharusnya menjadi lahan konservasi, sehingga lahan kritis juga semakin luas.

4. Sumberdaya Manusia dalam Pertanian

Sumberdaya manusia (SDM) adalah tenaga kerja yang mampu bekerja dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (UU Ketenaga kerjaan). Kondisi SDM dalam bidang pertanian atau petani di Indonesia masih sangat rendah. Dilihat dari pendidikannya 59, 2 % petani tidak menamatkan SD, sebanyak 32,1 %, tamatan SLTP dan SLTA masing-masing 5,7 dan 2,9 %.

Rendahnya tingkat pendidikan petani juga diikuti oleh rendahnya produktivitas kerja. Pada tahun 2002 produktivitas sektor pertanian bernilai Rp 1,69 juta rupiah per orang. Pada tahun 2003 nilainya turun menjadi Rp 1,68 juta per orang. Sementara itu, pada sektor lainnya (pertambangan, listrik, gas, dan air) angka produktivitas mencapai Rp 54,94 juta per orang. Di sektor perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan dan hotel mencapai nilai Rp 4,21 juta per orang, dan merupakan urutan kedua terendah setelah pertanian. Angka produktivitas tersebut mengandung arti bahwa sektor pertanian saat ini dalam kondisi yang sudah jenuh terhadap kesempatan kerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut terkait dengan kondisi umur, tingkat pendidikan, curahan jam kerja, dan luas garapan petani. Sebaran tenaga kerja pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) berdasarkan kelompok umur memperlihatkan bahwa, sebagian besar berada pada umur 25-44 tahun (46%), kemudian kelompok umur diatas 45 tahun (38%), dan kelompok umur kurang dari 25 tahun (16%). Pada masa yang akan datang dikhawatirkan akan kekurangan tenaga kerja pertanian. Tren *aging agriculture* sudah mulai terlihat pada sektor pertanian yaitu tenaga kerjanya mulai menunjukkan komposisi penduduk usia lanjut yang semakin besar. Kondisi ini sudah banyak terjadi seperti yang dikemukakan oleh Collier (1996) berdasarkan hasil penelitiannya di daerah pedesaan di Jawa yaitu:

Suatu perubahan utama dalam pertanian di Jawa berupa kekurangan buruh tani yang lebih besar, bahkan di daerah berpenduduk sangat padat. Kekurangan ini terjadi karena tarikan orang ke pekerjaan lebih menarik di daerah urban dan perasaan orang-orang muda yang berpendidikan menengah yang tidak tertarik bekerja sebagai petani.

Tenaga kerja pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yang jumlahnya mencapai 81% dari tenaga kerja pertanian. Meskipun industri kecil di wilayah pedesaan mendapat perhatian untuk dikembangkan, namun keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mereka menjadi kendala untuk ikut terlibat secara positif dalam industri kecil pedesaan.

5. Penutup

Masih tingginya peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja yang ada saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah perlu menempatkan sektor ini sebagai sektor yang penting untuk dikembangkan bersama-sama dengan sektor lainnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat hendaknya memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian. Sektor pertanian sampai saat ini masih ditempatkan pada posisi marginal, sehingga produktivitasnya paling rendah diantara sektor lainnya. Karena itu, sudah saatnya perhatian penuh ditujukan untuk menjadikan sektor ini memiliki daya saing dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

Collier, William L, 1996. *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa (Kajian Pedesaan Selama 25 Tahun)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Depnakertrans, 2005. *Rencana Ketenagakerjaan 2004-2009*. Jakarta: Denakertrans

Dillon, H.S., 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Soegiharto, Saraswati, 2004. *Potret Tenaga Kerja di Sektor Pertanian*. Jakarta: Warta Ketenagakerjaan

Soepriatna, Tjahya, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pemberantasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press